



PERLAWANAN PEREMPUAN MELAWAN PATRIARKI MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL

Oleh:

Regina Rasyid Althaaf¹

Yani Achdiani²

Sarah Nurul Fatimah³

Universitas Pendidikan Indonesia

Alamat: JL. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat
(40154).

Korespondensi Penulis: reginarasayid@student.upi.edu, yaniachdiani@upi.edu,
sarahnurulfatimah@upi.edu.

Abstract. Patriarchal culture has long been an inherent and dominant social system in Indonesian society, placing men as rulers and women in subordinate positions. This article aims to analyze the manifestations and dynamics of resistance to patriarchal culture in Indonesia, which culturally and structurally poses a significant challenge to gender equality. Using the literature study method, this study conducted an in-depth review of the scientific literature that discusses the phenomenon of perpetuation and women's agency. This study found that patriarchy perpetuates male dominance and creates various forms of injustice, including the subordination of domestic roles that lead to a condition of double burden for women. Patriarchal values are reinforced through cultural norms and manifest themselves in structural gaps in the public sector such as education, career, and political participation. However, the main results show a transformation of women's roles driven by policies such as Gender Mainstreaming (PUG) and supported by the dual resistance of women themselves, namely ideological resistance and economic empowerment. The implications of this study suggest the need for PUG intervention to deconstruct cultural norms as well as structural policies that ensure women's full access to economic resources to support sustainable social transformation.

Received November 05, 2025; Revised November 16, 2025; December 02, 2025

*Corresponding author: reginarasayid@student.upi.edu

PERLAWANAN PEREMPUAN MELAWAN PATRIARKI MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL

Keywords: *Patriarchy, Women's Agency, Social Transformation.*

Abstrak. Budaya patriarki telah lama menjadi sistem sosial yang melekat dan dominan dalam masyarakat Indonesia, menepatkan laki-laki sebagai penguasa dan perempuan pada posisi subordinat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis manifesti dan dinamika perlawanan terhadap budaya patriarki di Indonesia, yang secara kultural dan struktural menjadi tantangan signifikan bagi kesetaraan gender. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini melakukan telaah mendalam atas literatur ilmiah yang membahas fenomena pelanggengan dan agensi perempuan. Kajian ini menemukan bahwa patriarki melanggengkan dominasi laki-laki dan menciptakan berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk subordinasi peran domestik yang berujung pada kondisi beban ganda bagi perempuan. Nilai-nilai patriarki diperkuat melalui norma kultural dan memanifesti diri dalam kesenjangan struktural di sector publik seperti Pendidikan, karier, dan partisipasi politik. Namun, hasil utama menunjukkan adanya transformasi peran perempuan yang didorong oleh kebijakan seperti Pengarusutamaan Gender (PUG) dan didukung oleh perlawanan ganda dari perempuan sendiri yaitu dengan resistensi ideologis dan pemberdayaan ekonomi. Impilikasi penelitian ini menyarankan perlunya interverensi PUG untuk mendekonstruksi norma kultural sekaligus kebijakan struktural yang menjamin akses penuh perempuan terhadap sumber daya ekonomi demi mendukung transformasi sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Patriarki, Agensi Perempuan, Transformasi Sosial.

LATAR BELAKANG

Pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Sustainable Development Goals/SDGs) mensyaratkan adanya partisipasi dan manfaat yang sama bagi semua masyarakat. Dalam konteks ini, kesetaraan gender (SDGs 5) tidak hanya dipandang sebagai tujuan, tetapi juga sebagai hak asasi manusia yang krusial dan universal guna mendukung pembangunan yang inklusif dan jangka panjang (Sudirman & Susilawaty, 2022). Namun, upaya mencapai kesetaraan di Indonesia masih menghadapi pada tantangan mendasar berupa budaya patriarki. Patriarki merupakan suatu sistem

sosio-struktural yang memberikan lalaki sebagai pemegang kekuasaan di berbagai lembaga, baik publik maupun domestik, sehingga menciptakan ekspektasi sosial yang mengharuskan perempuan untuk menerima dan beradaptasi dengan posisi subordinat (Syahputra et al., 2023).

Tradisi patriarki adalah suatu sistem sosial dan ideologi yang telah lama mengakar dalam struktur masyarakat (Swari, 2023). Pola pikir ini menimbulkan ketidaksetaraan gender yang secara signifikan membatasi hak, kesempatan, dan peran perempuan di berbagai kehidupan. Manifestasi ketidaksetaraan ini tampak terlihat jelas, mulai dari internalisasi Batasan peran tradisional yang terkandung dalam narasi budaya, hingga tanggung jawab ganda yang harus dipikul perempuan saat memasuki ranah (Saefulloh et al., 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa budaya patriarki masih memiliki pengaruh struktural yang kuat, sehingga menghalangi perempuan untuk mengakses sumber daya dan kesempatan secara setara.

Budaya patriarki berakar kuat dalam manifestasi kultural yang telah menginternalisasi pembatasan peran perempuan. Secara naratif, legitimasi peran pasif ini diperkuat melalui tradisi dan cerita rakyat (Sugiarti, 2021). Manifestasi kultural tersebut berkonsekuensi langsung pada kehidupan perempuan modern, menciptakan beban ganda dan membatasi agensi serta hak perempuan atas pendidikan.

Sistem patriarki juga dipertahankan dengan hambatan struktural, beroperasi di ranah publik dan institusional. Karier perempuan sering kali dihadapkan pada fenomena glass ceiling dan diskriminasi dalam hal kesempatan upah dan promosi. Sementara itu di area politik, upaya afirmasi melalui kuota 30% seringkali tidak efektif. Hal ini diperparah oleh praktik rekrutmen politik yang diskriminatif dan fenomena "patriarki berkedok tubuh perempuan" (Tamrin, 2024), yang membuktikan bahwa hambatan terletak pada sistem, bukan pada kualifikasi perempuan.

Tekanan berlapis dari kultural dan struktural tidak diterima secara pasif, melainkan memicu dinamika perlawanan dan transformasi peran perempuan. Transformasi ini didorong oleh kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peningkatan akses terhadap Pendidikan. Hal ini memicu pergeseran peran yang bersifat multidimensional. Perlawanan ini diwujudkan dengan resistensi ideologis, seperti penolakan pernikahan dini (Nafizah et al., 2023), dan juga melalui aksi ekonomi, di

PERLAWANAN PEREMPUAN MELAWAN PATRIARKI MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL

mana perempuan berusaha mengambil kendali atas sumber daya dan kapasitas pengambilan keputusan (Rosyidi et al., 2025).

Kajian mengenai tradisi dan transformasi patriarki di Indonesia menjadi penting untuk dipahami bagaimana akar budaya patriarki terbentuk, bagaimana akar tersebut berubah, dan bagaimana perlawanan perempuan. Berdasarkan konteks dia atas, tujuan artikel ini untuk menganalisis pola kausalitas antara manifestasi patriarki (kultural dan struktural) dengan inisiatif perlawanan perempuan dalam meraih kesetaraan gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan Maksudnya, penelitian ini secara khusus berfokus pada telaahan sistematis atas berbagai literatur ilmiah, dan buku-buku yang relevan untuk dikembangkan dalam bentuk artikel ilmiah. Studi kepustakaan merupakan metodologi yang dilaksanakan melalui telaahan dan peninjauan literatur secara intensif, mencakup pengumpulan bahan pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolahnya sebagai basis penyusunan artikel ilmiah (Zed, dalam Evita & Nuryono, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manifestasi Kultural Patriarki: Subordinasi, Beban Ganda, dan Legitimasi Tradisional

Penghalang utama bagi perempuan untuk maju yaitu sistem budaya patriarki yang termanifesti. Ditinjau dari kultural, konstruksi sosial membatasi peran perempuan pada ranah domestik yang direpresentasikan dalam frasa dapur, kasur, sumur (Suratama, 2025). Unsur ini menetapkan fungsi perempuan pada layanan domestik, reproduksi, dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Perempuan yang bekerja menghadapi konsekuensi langsung dari peran ganda yang dikukuhkan secara kultural yaitu kondisi beban ganda. Meskipun perempuan berpartisipasi di kegiatan ekonomi, perempuan tetap memikul tanggung jawab utama untuk mengelola pekerjaan domestik. Pola pikir patriarki memandang laki-laki tidak boleh ikut membantu pekerjaan domestik.

Beban ganda yang dialami perempuan menimbulkan kelelahan fisik dan emosional karena perempuan memikul tanggung jawab penuh dalam pengelolaan rumah tangga dan pengurusan anak tanpa adanya dukungan penuh dari pasangan. Kondisi ini menegaskan perlunya dukungan struktural dan intervensi kebijakan berbasis kesetaraan gender, seperti sosialisasi keluarga dan Pendidikan gender yang dimulai sejak dini. Hal ini sejalan dengan perjuangan feminism liberal yang berupaya menciptakan ruang dan pilihan yang adil bagi perempuan, memastikan perempuan dapat menjalankan peran di masyarakat tanpa hambatan yang tidak seimbang (Jasmiarto et al., 2025).

Tekanan internal dan perasaan bersalah muncul ketika pembagian peran tidak seimbang. Perempuan yang bekerja sulit menyeimbangkan tuntutan karier dan ekspektasi sosial untuk menjadi ibu dan istri sempurna. Hal ini sejalan dengan penelitian (Saefulloh et al., 2023), hambatan dan struktural terbesar dialami perempuan dalam orientasi dan mobilitas karier di Indonesia karena tuntutan domestik yang tak terhindarkan.

Pelanggengan nilai patriarki diperkuat oleh cerita rakyat yang dilegitimasi sebagai bagian dari tradisi. Sugiarti (2021) kajiannya terhadap cerita rakyat Jawa Timur, menemukan bagaimana narasi-narasi budaya ini secara simbolis dan ideologis mewariskan nilai-nilai kepatuhan, pengorbanan, dan peran pasif kepada generasi muda. Misalnya, penggambaran tokoh perempuan yang hanya sukses setelah berkorban atau menurut kehendak suami, secara tidak langsung menanamkan pemahaman bahwa ketidakadilan gender adalah hal yang wajar. Dengan demikian, narasi budaya berfungsi sebagai alat sosialisasi yang efektif, membuat sistem patriarki terasa wajar dan alami, sehingga sulit untuk dipertanyakan dan di lawan serta narasi budaya ini secara simbolik mewariskan dan menanamkan nilai keterbatasan perempuan di ruang publik.

Manifestasi kultural patriarki tidak hanya terbatas pada narasi tradisional, tetapi juga direplikasi dan direspon dalam karya seni kontemporer yang menegaskan keberlangsungan budaya tersebut di kehidupan sehari-hari. Jika Sugiarti (2021) menganalisis bagaimana cerita rakyat Jawa Timur melegitimasi peran pasif dan kepatuhan perempuan, maka representasi yang sama terlihat dalam film Indonesia seperti “Yuni”. Febiola et al. (2022) dalam analisis terhadap film “Yuni” menunjukkan budaya patriarki di Indonesia termanifesti melalui isu-isu krusial seperti pernikahan dini dan pembatasan hak perempuan atas Pendidikan. Film “Yuni” menjadi cerminan nyata dari konsekuensi tradisi yang mengutamakan peran reproduktif dan domestik perempuan.

PERLAWANAN PEREMPUAN MELAWAN PATRIARKI MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL

Hambatan Struktural: Kesenjangan Gender di Ranah Publik

Pengaruh budaya patriarki meluas dan menciptakan hambatan struktural di ranah publik terutama dalam pendidikan karier dan politik. Hyronimus (2023) mewawancara salah satu warga dari budaya Lamaholot hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa perempuan hanya sebatas pelengkap yang hanya memperoleh hak pendidikan setelah anak laki-laki, anggapan ini lahir akibat dari paham budaya Lamaholot yang menganggap anak laki-laki merupakan anak suku (ahli waris) yang nantinya memiliki kontribusi yang besar untuk kemajuan suku sedangkan perempuan seringkali dianggap pelengkap hanya karena minimnya kontribusi perempuan setelah menikah, dari perspektif tersebut orang tua merasa dirugikan apabila memberikan akses pendidikan untuk anak perempuan.

Pola serupa juga tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh Nazhifah et al. (2025) di desa kota Anau. Ia mengemukakan bahwa pandangan umum masyarakat di sana beranggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, dan memandang perempuan menjalani hidup untuk mengurus pekerjaan domestik serta melayani suami. Pendidikan berperan penting dalam mendorong transformasi peran perempuan dalam struktur keluarga patriarki, karena melalui pendidikan, perempuan dapat meningkatkan kesadaran akan hak-haknya, memberdayakannya secara ekonomi, dan memperluas kesempatan berpartisipasi di luar ranah domestik (Nazwa & Dora, 2024).

Stereotip patriarki di dunia kerja seringkali menghalangi perempuan untuk naik jabatan, dengan anggapan bahwa perempuan tidak pantas untuk memimpin titik kesulitan perempuan untuk menembus jenjang karir diperkuat oleh adanya fenomena gas seiling istilah ini digunakan untuk menggambarkan penghalang atau hambatan yang bersifat transparan dan tidak terucapkan dalam lingkungan kerja, namun memiliki dampak signifikan dalam membatasi kesempatan perempuan untuk maju dan menaiki hierarki manajemen (Sutarman et al., 2024). Konsep ini didefinisikan secara akademis sebagai rintangan tersembunyi yang mencegah perempuan meraih posisi atau prestasi tertinggi dalam perjalanan karier(Sutarman et al., 2024) Fenomena ini menjadi salah satu bentuk diskriminasi struktural yang melekat mengukuhkan sulitnya perempuan menembus

posisi-posisi puncak. Ditambah lagi tekanan dari masyarakat dan beban ganda membuat perempuan semakin susah untuk berkembang secara karir.

Konsep ini didefinisikan secara akademis sebagai rintangan tersembunyi yang mencegah perempuan meraih posisi atau prestasi tertinggi dalam perjalanan karier mereka (Onuoha & Idemudia, dalam Sutarmen et al., 2024). Fenomena ini menjadi salah satu bentuk diskriminasi struktural yang melekat, mengukuhkan sulitnya perempuan menembus posisi-posisi puncak, Ditambah lagi, tekanan dari masyarakat dan beban ganda membuat perempuan semakin susah untuk berekmbang secara karier (Saefulloh et al., 2023). Partisipasi politik didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam kehidupan politik, seperti melalui pemilihan pmimpin negara atau pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan negara (Klerista & Subandi, 2025).

Menurut Sossou, dalam Klerista & Subandi (2025), mengungkapkan bahwa kandidat perempuan memiliki dukungan politik yang sedikit. Norma budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung proses pemberdayaan berkontribusi pada minimnya program pembinaan kepemimpinan dan pendidikan politik untuk perempuan. Dengan demikian, hambatan eksternal terhadap perempuan di ranah politik sebagian besar berasal dari lingkungan sosial dan arena politik itu sendiri (Klerista & Subandi, 2025). Di bidang politik, patriarki masih menganggap ini sebagai wilayah pria. Walaupun ada aturan kuota 30 persen untuk perempuan, hasilnya belum memuaskan karena cara partai politik merekrut orang masih diskriminatif berdasarkan gender dan jumlah perempuan yang benar-benar terpilih dan duduk di kursi parlemen seringkali jauh di bawah 30 persen.

Kegagalan penerepan kuota 30 persen dan diskirminasi dalam rekrutmen politik tersebut diperparah oleh paraktik yang diteliti oleh (Tamrin, 2024). Dalam kajiannya mengenai keterlibatan perempuan dalam politik di Sulawesi Selatan, Tamrin menemukan bahwa banyak perempuan tampil di panggung politik, bukan karena perjuangan emansipasi atau kemampuan tetapi karena hubungan keluarga dengan penguasa laki-laki. Fenomena ini kemudian disebut sebagai patriarki berkedok tubuh perempuan, di mana perempuan dijadikan symbol partisipasi untuk melanggenggkan kekuasaan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa representasi perempuan di ranah politik masih dikendalikan secara fundamental oleh struktur patriarki.

PERLAWANAN PEREMPUAN MELAWAN PATRIARKI MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL

Dinamika Pergeseran: Transformasi Peran Perempuan dan Perlawan Ideologis

Transformasi peran perempuan dipicu karena hambatan kultural dan struktural dari dominasi laki-laki menuju relasi yang lebih setara. Dalam merespons dinamika ini, Pengarusutamaan Gender (PUG) didefinisikan sebagai strategi pembangunan komprehensif yang memastikan perpektif, kebutuhan dan masalah gender dipertimbangkan secara adil (Halizah & Faralita, 2023). Penerapan kebijakan ini mengharuskan perencanaan yang responsif terhadap gender di setiap jenjang pemerintahan, dengan tujuan utama mengatasi ketidakseimbangan gender, selain itu (PUG) berfungsi sebagai strategi nasional untuk mengintegrasikan kebutuhan perempuan ke dalam seluruh proses pembangunan, dan memperkuat upaya kesetaraan (Halizah & Faralita, 2023).

Berdasarkan temuan dari (Yuslin, 2021), mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kebijakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi strategi pengarusutamaan gender. Pertama, perjelas regulasi yang mewajibkan pemberdayaan perempuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kedua, ubah sistem pemilu dari sistem proposisional terbuka yang terbukti rentan terhadap praktik tokenisme (patriarki berkedok tubuh perempuan) menjadi sistem proposisional tertutup yang secara tegas mewajibkan keterwakilan perempuan minimal sebesar 30 persen. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perempuan di dunia kerja. Ketiga, tingkatkan sarana dan prasarana Pendidikan untuk meningkatkan kualitas perempuan di dunia kerja. Keempat, hapus segala bentuk diskriminasi upah melalui kebijakan responsive gender. Kelima, berikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan.

Perlawan selanjutnya yaitu resistensi ideologis. Perempuan menunjukkan perubahan terhadap cara pandang melalui penolakan pernikahan dini, menuntut partisipasi dalam keputusan keluarga, serta memperjuangkan hak atas pendidikan, hal ini menunjukkan upaya nyata untuk melakukan rekonstruksi gender (Nafizah, 2025). Perlawan perempuan ini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya sekadar objek dari sistem, melainkan juga sebagai subjek aktif yang menantang dan merekonstruksi paradigma, memanifestasikan transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang lebih setara.

Film “Yuni” menjadi sebuah bukti nyata tekanan kultural yang dialami perempuan di masa modern (Febiola et al., 2022). Penolakan tokoh Yuni terhadap pernikahan dini dan tuntutannya atas Pendidikan adalah bentuk perlawanan ideologis yang secara aktif menentang sistem. Hal ini sejalan dengan temuan Nazhifah et al. (2025) yang mendefinisikan penolakan pernikahan dini dan tuntutan partisipasi dalam keputusan keluarga sebagai upaya nyata untuk melakukan rekonstruksi gender.

Selain resistensi ideologis, perempuan memanifestasikan perlawanan terhadap budaya patriarki melalui aksi ekonomi. Partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan finansial dan kepemilikan aset merupakan jalur strategis untuk mendorong pemberdayaan gender (Pratama & Khofi, 2025). Mekanisme ini secara langsung memutus rantai ketergantungan dan memberikan peremouan agensi dan control yang signifikan terhadap sumber daya rumah tangga. Analisis menunjukkan bahwa kepemilikan aset telah terbukti menjadi determinan penting dalam memperkuat posisi tawar perempuan di ranah privat. Di ranah publik, peran pengusaha perempuan berfungsi sebagai pendorong utama perubahan sosial yang menantang norma-norma gender yang ada (Rosyidi et al., 2025). Meskipun demikian, efektivitas perlawanan ekonomi ini masih menghadapi tantangan besar dari norma sosial yang mengakar, literasi keuangan, dan hambatan struktural yang terus membatasi otonomi penuh perempuan..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Budaya patriarki di Indonesia masih mengakar dan dilanggengkan melalui dua pola dominan. Pertama, Manifestasi Kultural yang membatasi peran perempuan pada dikotomi domestik (dapur, kasur, sumur), diperkuat oleh narasi ideologis dalam cerita rakyat yang mananamkan kepasifan dan kepatuhan. Konsekuensi langsungnya adalah beban ganda yang menimbulkan kelelahan fisik dan emosional pada perempuan pekerja. Kedua, Hambatan Struktural yang terlihat jelas di ranah publik, di mana perempuan menghadapi diskriminasi tersembunyi (*glass ceiling*) dan kegagalan kebijakan kuota 30% di politik. Kegagalan ini diperparah oleh fenomena "patriarki berkedok tubuh perempuan" yang mengubah tujuan emansipasi menjadi sekadar simbol pelanggeng kekuasaan laki-laki.

PERLAWANAN PEREMPUAN MELAWAN PATRIARKI MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL

Meskipun menghadapi pelanggengan struktural dan kultural, kajian ini mengidentifikasi adanya dinamika pergeseran yang dipicu oleh kesadaran kritis melalui pendidikan tinggi dan kerangka kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Transformasi ini dimanifestasikan melalui perlawanan multidimensional dari perempuan sebagai subjek aktif. Perlawanan tersebut terwujud secara ideologis (menolak pernikahan dini dan menuntut partisipasi dalam keputusan keluarga) serta ekonomi. Secara khusus, kemandirian finansial dan kepemilikan aset berfungsi sebagai instrumen vital yang secara signifikan meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) perempuan, mematahkan ketergantungan ekonomi, dan memberikan agensi yang lebih besar dalam ruang privat dan publik.

Saran

Berdasarkan temuan ini, penelitian menyimpulkan bahwa penghapusan ketidakadilan gender menuntut intervensi struktural yang lebih tegas. Pertama, diperlukan reformasi sistemik di arena politik, termasuk peninjauan ulang sistem pemilu (misalnya, sistem proporsional tertutup yang menjamin keterwakilan 30%) dan kewajiban pemberdayaan wanita dalam regulasi partai politik. Kedua, PUG harus diperluas cakupannya hingga mengatasi ketidakadilan di ranah domestik. Ketiga, untuk mendukung agensi perempuan, pemerintah dan institusi terkait wajib menghapus segala bentuk diskriminasi upah, meningkatkan sarana dan prasarana literasi keuangan, serta memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi tenaga kerja perempuan.

DAFTAR REFERENSI

- Evita, R., & Nuryono, W. (n.d.). STUDI KEPUSTAKAAN TEORI KONSELING “DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY” Evita Roesnilam Syafitri. *Ejournal Unessa*, 53–59.
- Febiola, N., Aritorang, A. I., & Budiana, D. (2022). *REPRESENTASI PATRIARKI DALAM FILM “YUNI .”* 12(2), 100–112. <https://doi.org/10.9744/scriptura.12.2.100-112>
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>
- Hyronimus. (2023). Pendidikan Anak Perempuan Dalam Perspektif Budaya Patriarki (Studi Pada Budaya Lamaholot). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 175–186. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i1.1099>
- Jasmiarto, D., Ridwan, A., & Listyani, R. H. (2025). Keluarga Patriarki dalam Pandangan Feminisme Liberal : Studi Pada Keluarga di Desa Sumbertumpuk Pasuruan. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 6 (1)(X), 39–54.
- Klerista, T., & Subandi, Y. (2025). Dampak Budaya Patriarki Terhadap Kaum Perempuan Dalam Aspek Politik dan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(6), 350–357. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i6.1016>
- Nazhifah, S. N., Fatmariza, F., Montessori, M., & Dewi, S. F. (2025). Rekonstruksi gender: upaya perempuan melakukan transformasi terhadap patriarki. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(1), 107–115. <https://doi.org/10.24036/jecco.v5i1.669>
- Nazwa, S., & Dora, N. (2024). Transformasi peran perempuan dalam dinamika rumah tangga patriarki: perspektif pendidikan. *Journal Tarbiyah Islamiyah*, 9(2), 396–410.
- Pratama, I. N., & Khofī, M. Y. (2025). *Kekuatan Keputusan Finansial Perempuan dan Kepemilikan Aset Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Berbasis Gender*. 22(01).
- Rosyidi, L. H., Rofiq, A., & Khusnudin. (2025). PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENGUATAN KESETARAAN

PERLAWANAN PEREMPUAN MELAWAN PATRIARKI MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL

- GENDER. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 20–34. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v11i1.3160>
- Saefulloh, F., Yustin Suryana, H., Nisari, N., Setiawan, A., Bayu Wibowo Pamungkas, K., Ratna Wijayakusuma, F., & Kunci, K. (2023). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Orientasi Karier Perempuan. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang*, 1(1), 7–12.
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) : SUATU REVIEWS LITERATUR SISTEMATIS. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010.
- Sugiarti. (2021). Budaya patriarki dalam cerita rakyat Jawa Timur (Patriarchal culture in East Java folklores). *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 7(2), 424–437.
- Suratama, E. S. (2025). *Perempuan Melampaui Dapur , Kasur dan Sumur : dalam Bingkai Kesetaraan Gender*. 4(9), 2726–2732.
- Sutarman, T., Hanifatusholihah, Pangabean, H., Marta, R. F., & Kurniawati. (2024). STEREOTIP GENDER PADA BUDAYA PATRIARKI INDONESIA SEBAGAI HAMBATAN PEKERJA PEREMPUAN BERPERAN GANDA. *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 21.
- Swari, P. R. (2023). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya Budaya Patriarki dan Tantangan Dalam Kebebasan Berekspresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf)*. 25(2), 213–218.
- Syahputra, D. D., Bangun, M. B., & Handayani, S. M. (2023). Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Desa Bontoraja , Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Sustainable*, 6(2), 608–616.
- Tamrin, S. (2024). *Patriarki Berkedok Tubuh Perempuan : Sebuah Analisis Feminis*. 7, 301–310.
- Yuslin, H. (2021). Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(3), 162–170. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.04>